

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan.

Sedangkan menurut Sumarto (dalam Moch sholekhan 2014:141) menjelaskan bahwa “partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antara *steakholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberative, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.

Menurut Janabrota (Mohammad Mulyadi 2019:15) mengartikan bahwa “partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri”.

Salah satu tujuan terpenting partisipasi yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanoff dalam Adiyoso (dalam Moch Sholekhan 2104:142) bahwa “tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan, meberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.”

Sedangkan menurut Rusidi (dalam Moch Sholekhan 2014:152) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi :

1. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan)
2. Sumbangan materi (dana, barang, dan alat)
3. Sumbangan tenaga (bekerja)
4. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan

Maka dari itu,dapat disimpulkan definisi dari beberapa ahli diatas yaitu bahwa partisipasi merupakan interaksi antar kelompok atau individu tanpa adanya suatu paksaan, partisipasi juga dapat memberikan ruang untuk masyarakat dalam menyuarakan suara atau keinginannya dalam proses pengambil bagian atau keputusan yang bermaksud untuk memperoleh manfaat dari hasil keputusan yang telah dilakukan bersama dan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh kelompok ataupun dari individu sendiri.

2.1.2 Unsur-unsur Partisipasi

Sedangkan menurut Moch Sholekhan (2014:144) membedakan bahwa partisipasi itu merupakan keikutsertaan atau keterlibatan secara sadar dan sukarela untuk berkontribusi secara fisik maupun non fisik jika di perinci pengertian partisipasi tersebut mengandung unsur

1. Keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan
2. Kesadaran secara suka rela
3. Adanya sikap pro aktif
4. Adanya kontribusi yang diberikan, baik secara fisik atau non fisik, dan
5. Adanya kesepakatan-kesepakatan.

2.1.3 Macam-macam partisipasi

Menurut Nelson (dalam Moch Sholekhan 2014:113) antara lain :

1. Partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal
2. Partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, atau antara masyarakat dengan pemerintahan yang diberi nama partisipasi vertikal.

Hal ini sekaligus sebagai telaah analisis dari pendapat Soetrisno (dalam Moch Sholekhan 2014:114) yang menyatakan bahwa partisipasi dapat dibedakan menjadi , yaitu :

1. Partisipasi adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan oleh pemerintah.
2. Partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas, bahwa fakta yang terjadi di lapangan seringkali menunjukan bahwa sejumlah *stakeholder* masih mempersepsikan bahwa partisipasi yang berlangsung, dimana masyarakat dikatakan partisipatif jika mereka mau mendukung secara mutlak dari

program-program pemerintah yang direncanakan dan ditentukan oleh pemerintah.

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Sedangkan Menurut Hetifah (dalam Moch Sholekha 2014: 97)“ staretgi tersebut diambil dengan pertimbangan adanya tiga hambatan utama dalam penerapan partisipasi yang baik, yaitu :

- a) Pertama, hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi. Diantaranya adalah kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung partisipasi.
- b) Kedua, hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, kurang terorganisir dan kurang memiliki kapasitas yang memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat kuranya informasi.
- c) Ketiga, hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik teknik partisipasi

2.2 Tinjauan Tentang Masyarakat

2.2.1 Pengertian Masyarakat

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian interkasinya antar individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut

Ralp Linton dalam (Jacobus Ranjabar 2014:18) mengemukakan “masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”.

Sedangkan menurut Mc Iver dan Page dalam (Jacobus 2014:18) mengatakan bahwa “masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia”.

Selo Soemardjan dalam (Jacobus 2014:18) menyatakan bahwa “masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Definisi masyarakat menurut para ahli diatas, pada dasarnya isinya sama,yaitu bahwa masyarakat yang mencakup beberapa unsur (Jacobus Ranjabar 2014:19) sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu system hidup bersama. system kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Soerjono Soekanto (2014:130) mengelompokan masyarakat menjadi tiga jenis yaitu :

1. Masyarakat setempat
2. Masyarakat pedesaan
3. Masyarakat perkotaan

Adapun penjelasan dari kelompok masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat setempat

Dimana masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Adapun tipe-tipe masyarakat setempat yaitu:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman
- c. Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat
- d. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.

2. Masyarakat pedesaan

Warga pedesaan adalah suatu masyarakat mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat desa lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kehidupan kekeluargaan.

3. Masyarakat perkotaan

Masyarakat perkotaan adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Ada beberapa ciri yang menonjol terhadap masyarakat kota, yaitu sebagai berikut :

- a. Kehidupan agama kurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di kota.
- b. Orang kota pada umumnya bisa mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
- c. Pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan punya batas-batas nyata.
- d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan, lebih banyak di peroleh warga kota dari pada warga desa karena pembagian kerja yang tegas tersebut diatas.
- e. Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut oleh masyarakat perkotaan, menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi berdasarkan kepentingan dari pada faktor pribadi.

- f. Jalan kehidupan yang cepat di kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu.
- g. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota karena kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh luar.

Adapun yang menjadi faktor manusia hidup bermasyarakat adalah sebagai berikut:

1. Hasrat yang berdasarkan dari naluri seseorang untuk mencari teman hidup
2. Kelemahan dari manusia yang terbilang sangat mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang di peroleh dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan usaha bersama.

Maka dari itu masyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem atau suatu sistem sosial, yaitu suatu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan untuk dapat saling memberikan manfaat dan juga dapat memenuhi keinginan dalam kehidupan nya

2.3 Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

2.3.1 Pengertian partisipasi masyarakat

Adisasmita (dalam Moch Sholekhan 2014:141) mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat”.

Partisipasi masyarakat itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Conyers (dalam Moch Sholekhan 2014:141) menyebutkan, terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu.
3. Dalam perspektif demokrasi bahwa partisipasi itu merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan.

Dalam hal ini, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam suatu pembangunan, apabila mereka merasa akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena tugas mereka yaitu bertanggung jawab dalam suatu program pembangunan. Masyarakat juga perlu mendapatkan bantuan tentang apa yang di butuhkan termasuk ke dalam bagaimana mereka memperoleh kepuasan dalam hal pembangunan. Dan yang paling penting yaitu bagaimana mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan yang belum di rasakan oleh mereka.

Secara teoritis partisipasi masyarakat ini memang mudah sekali untuk dibicarakan. Namun dalam paraktek dan pelaksanaannya sering terjadi manipulasi dan rekayasa. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu baik secara internal (yaitu: motivasi, pengetahuan, pengalaman individu dan lain sebagainya), maupun secara eksternal yaitu (peran *steakholders*, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya). Bahkan tidak sedikit proyek-proyek pembangunan yang menggunakan pendekatan partisipasi, namun dalam pelaksanaannya bukan partisipasi tapi mobilisasi, dan prosesnya bukan *bottom up* tetapi *top down*. Maskun (dalam Moch Sholekhan 2014:164) bahwa “partisipasi masyarakat itu merupakan suatu *partnership system* dalam membangun masyarakat desa”. Dalam partisipasi masyarakat dapat ditentukan oleh beberapa faktor menurut Maskun (dalam Mohammad Mulyadi 2019:96) yaitu :

1. Kebutuhan masyarakat
2. Interest masyarakat
3. Adat istiadat
4. Sifat-sifat komunal yang meningkat setiap anggota masyarakat satu sama lainnya.

2.3.2 Bentuk-bentuk Partisipasi masyarakat

Cohen dan Uphoff (dalam Mohamad Mulyadi 2019:25) memberikan rumusan-rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi kemanfaatan
4. Partisipasi evaluasi

Dari bentuk-bentuk partisipasi diatas dapat di jelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat berwujud kontribusi. Uphoff (dalam Mohammad Mulyadi 2019:33) mengemukakan bahwa “partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan bahwa:

partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang dan barang material”.

3. Partisipasi kemanfaatan, merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih/positif bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Partisipasi evaluasi, adalah keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan.

2.3.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Sedangkan terkait dengan partisipasi masyarakat atas kebijakan pemerintah, Maskun (dalam Moch Sholekhan 2014:164) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat tersebut terbentuknya bertingkat-tingkat, meliputi:

1. Terdapat pemahaman timbal balik antara perangkat pemerintah dengan masyarakat yang bersangkutan
2. Terdapatnya sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas niat baik dan keinginan politik dari pemerintah.

3. Tertampungnya kepentingan-kepentingan masyarakat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Terdapatnya usaha-usaha motivasi dan stimulasi yang dapat mendorong kreatifitas masyarakat.

Untuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut, maka ada beberapa indikator yang digunakan yaitu :

1. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan
2. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
3. Keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan hasil
4. Keikutsertaan masyarakat dalam evaluasi pembangunan.

Berbagai hipotesis telah diajukan dan diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan masyarakat desa. Maksudnya berarti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin membuat pembangunan masyarakat desa tersebut berhasil. Begitupun sebaliknya semakin rendah partisipasi masyarakat, maka akan semakin membuat pembangunan masyarakat desa tidak berhasil.

2.3.4 Faktor-faktor partisipasi masyarakat

Menurut Moch Sholekhan (2014:143) yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu :

1. Faktor internal, yaitu motivasi, pengetahuan, pengalaman individu.
2. Faktor eksternal, meliputi peran *stakeholder*, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya.

2.3.5 Prinsip Partisipasi Masyarakat

Sangat disadari bahwa pengembangan partisipasi masyarakat itu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh yang menyebabkan formalisasi partisipasi menjadi sangat bervariasi dengan satu dan lainnya. Pengertian partisipasi itu mengandung pengertian yang bergerak dinamis dalam suatu proses perkembangan. Beberapa prinsip dasar pengembangan partisipasi masyarakat tersebut (Moch Sholekhan 2014:153), diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kebersamaan
2. Tumbuh dari bawah
3. Kepercayaan dan keterbukaan

Dari tiga prinsip dasar diatas dapat di jelaskan bahwa :

1. Kebersamaan

Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pelembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen, baik struktural maupun kultural secara vertical atau pun horizontal. Partisipasi muncul berdasarkan *consensus* dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan

satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.

2. Tumbuh dari bawah

Partisipasi itu bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah (top down) atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi itu tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, partisipasi itu merupakan suatu proses pelebagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan penyelenggaraan suatu kegiatan.

3. Kepercayaan dan keterbukaan

Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mempunyai peran yang sangat penting hal ini di dasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek akan tetapi juga berperan sebagai subjek pembangunan. partisipasi masyarakat merupakan kesediaan secara ikhlas dari seseorang untuk membangun kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerahnya, karena partisipasi yang dilakukan dengan ikhlas (sukarela) akan membuat masyarakat merasa turut menjadi bagian dari kegiatan tersebut. (Mohammad Mulyadi 2019:24)

Aspek penting dalam rangka partisipasi pembangunan menurut Bintoro Tjokroroamidjojo (1984:222) antara lain :

1. Terlibatnya dan ikutserta rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Cermin dari kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partisipasi rakyat di dalam keterlibatan politik mereka dalam proses politik. Pengembangan keterlibatan dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan ini tidak saja ditekankan oleh suatu organisasi seperti PBB. Tetapi juga oleh seorang ahli seperti waldo.
2. Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahannya mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut. Dalam partisipasi pembangunan perlu dikembangkan kemampuan-kemampuan masyarakat dan terutama organisasi-organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung proses pembangunan.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Dalam hal ini tergantung dari sistem dan tata

cara penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku bagi suatu negara. Ada kalanya pemerintah mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih bersifat mobilisasi dari pada partisipasi.

4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tingkat tertentu memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut.

Sehingga dalam Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat tentu membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dinamika partisipasi masyarakat dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan pembangunan dapat juga dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut. partisipasi masyarakat di dalam pembangunan memiliki peran yang sangat penting.

Menurut Sihombing (dalam Mohammad Mulyadi 2014:28) bahwa “pengertian partisipasi dalam konteks pembangunan yang memerdekakan, bukan semata-mata berdasarkan kebaikan hati para elit pengambil keputusan. Akan tetapi, partisipasi adalah hak dasar yang sah dari umat manusia untuk turut serta menyajikan harapan kemerdekaan dirinya”.

Maka dari Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dari pembangunan itu

sendiri yaitu untuk kesejahteraan bersama. peran serta masyarakat yang tinggi akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu program pembangunan.

Sedangkan menurut Riyadi dan Dedy Supriyadi Bratakusumah (dalam Anggara, Sumantri 2016:19) “pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar dan terencana.

Sehingga pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kedalam keadaan yang lebih baik lagi. Pembangunan sendiri dilakukan secara terencana baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dalam pembangunan mengarah kepada cara hidup yang baru dan dapat lebih baik dari yang sebelumnya. dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi seluruh jajarannya dan masyarakat setempat juga harus ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam hal ini, meskipun harus diakui bahwa peran pemerintah cukup dominan. Pembangunan yang meliputi segala hal kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila suatu hal kegiatan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dari seluruh rakyat di dalam suatu negara. Tidak hanya dalam pengambil kebijakan tertinggi, perencanaan, pemimpin pelaksanaan operasional, akan tetapi dalam kegiatan pembanguna yang dilakukan oleh pemerintahan.

2.4 Tinjauan tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

2.4.1 Program KOTAKU dan Definisi Kumuh

Program KOTAKU adalah suatu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100. Gerakan 100-0-100 merupakan 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak pakai. Arah dari kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan memfasilitasi komunitas. Dari program KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. (sumber: kotaku.pu.go.id/05/mei/2020/08:29.4)

Dalam penanganan permukiman kumuh membutuhkan banyak kolaborasi antar sektor oleh banyak pihak untuk dapat menggerakkan sumber daya, dan dana yaitu dari tingkat pusat, provinsi dan Kota atau Kabupaten serta diharapkan dapat berkolaborasi dalam peningkatan kualitas permukiman di wilayah yang dituju untuk dapat mewujudkan nya 0 Ha permukiman kumuh.

Permukiman kumuh ini diwarnai oleh tingkat kepadatan suatu penduduk tertentu yang sangat tinggi, , tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan layak huni sangat rendah, tidak memadai sarana dan

prasarana, jalan, pengelolaan sampah atau TP3SR dan lain sebagainya yang menjadikan indikator kumuh.

2.4.2 Tujuan Program KOTAKU

Tujuan dari Program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan yang melalui akses infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat Kelurahan atau Desa. Dalam tujuan diatas tersebut terkandung dua maksud yaitu : Pertama, memperbaiki akses fasilitas masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas layanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah. (sumber: kotaku.pu.go.id/05/mei/2020/08.29.4)

2.4.3 Lokasi Sasaran Program KOTAKU

Program KOTAKU dilaksanakan di 34 Provinsi, yang tersebar di 269 Kabupaten/Kota pada 11.067 Desa/Kelurahan. Berdasarkan cakupan kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk berkelanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Dalam

Penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Desa maupun Kelurahan dan di tingkat Kelurahan atau Desa serta Kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis dengan program perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan atau Desa dan Kecamatan serta menjadi satu kesatuan dan sinkron dengan program tingkat Kabupaten atau Kota yang dipilih melalui forum-forum konsultasi intersif. Untuk dapat mewujudkan tujuan dari Program KOTAKU, ada beberapa tahapan pelaksanaan di tingkat Kelurahan atau Desa yang menjadi satu kesatuan dengan tahapan tingkat Kabupaten atau Kota yaitu:

1. Tahap persiapan

Tahapan persiapan dilakukan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Kelurahan/Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan Kelurahan/Desa dalam penyelenggaraan kolaborasi, dan pengalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.

Dalam tahapan persiapan meliputi dua kegiatan utama, yaitu : (1) sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya orientasi tingkat Desa atau Kelurahan, (2) pembentukan atau penguatan TIPP

Sebagai bahan sosialisasi, pemerintah Kecamatan, Kelurahan atau Desa dengan melalui persiapan sebagai berikut :

- 1) Pemetanaan wilayah yang sekiranya terkait dengan isu kumuh di Kecamatan maupun di Kelurahan atau Desa.
- 2) Pemahaman awal mengenai kondisi atau skala kumuh di tingkat Kecamatan, Kelurahan atau Desa
- 3) Kajian awal terhadap berbagai instansi dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk kebijakan dalam RPJMD/Desa, yang terkait dengan program KOTAKU.

2. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan merumuskan kondisi permukiman layak huni di tingkat Kelurahan atau Desa maupun antar Kecamatan yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang, sesuai dengan visi misi dan misi pembangunan permukiman tingkat Kelurahan atau Desa untuk mencapai 0 Ha permukiman kumuh yang dituangkan dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dengan kedalaman rencana teknis. Adapun tahapan rencana dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Membangun visi
- 2) Refleksi perkara krisis
- 3) Pemetaan swadaya

3. Tahap pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur harus sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen RPLP, pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel dimana setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan dan di catat dalam pembukuan. Tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah dokumen RPLP disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di RPLP serta merupakan kegiatan prioritas penanganan permukiman kumuh yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya:

- (1) APBN/Bantuan dana investasi, APBD dan APBD Desa
- (2) Swasta dan Swadaya
- (3) World Bank dan Islamic Development Bank

4. Tahap keberlanjutan

Tahap keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana di dalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi . (sumber: kotaku.pu.go.id/05/mei/2020/8:29.4)